

TETAP PERTIMBANGKAN SISI EKONOMI WARGA

Lokasi Parkir Kawasan Tugu Diinventarisir



KR-Franz Boedisukamanto

Penataan kawasan Tugu Yogyakarta, hampir selesai dan sudah terlihat tanpa kabel yang melintang.

YOGYA (KR) - Usai penataan kawasan Tugu Pal Putih, Pemkot Yogyakarta masih memiliki pekerjaan yang tak kalah pelik, yakni penyediaan lokasi parkir. Lokasi tersebut saat ini pun masih diinventarisir.

Diperkirakan, setelah kawasan Tugu terbebas dari kabel melintang, daya tarik untuk berkunjung ke sana akan semakin meningkat. Padahal badan jalan di area itu tidak akan diperbolehkan untuk parkir. "Mencari lokasi parkir ini tentu bukan pekerjaan mudah. Kami berkoordinasi dengan camat setempat untuk bersama-sama mengidentifikasi lokasi yang bisa dijadikan alternatif parkir untuk kawasan tersebut," jelas Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Agus Arif Nugroho, Rabu (16/12).

Oleh karena itu, ketika penataan Tugu tuntas 100 persen pada akhir bulan ini, kebijakan larangan parkir belum akan langsung diterapkan. Proses penataan parkir pun harus dilakukan secara bertahap. Hal ini karena untuk menginventarisir lokasi parkir membutuhkan waktu.

Agus menandakan, mencari lokasi parkir juga tidak mudah. Pengunjung atau wisatawan yang datang ke kawasan Tugu biasanya memanfaatkan sejumlah lokasi parkir yang sudah tersedia. Misalnya di sepanjang Jalan Diponegoro atau di depan Pasar Kranggan dan di Jalan Sudirman. "Kawasan Tugu ini biasanya ramai dikunjungi wisatawan pada malam hari saat lalu lintas di kawasan tersebut tidak lagi terlalu padat sehingga pengunjung bisa memanfaatkan lokasi parkir yang juga jauh lebih sepi dibanding saat siang hari," imbuhnya.

Salah satu alternatif lokasi parkir yang ditawarkan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah memanfaatkan Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali. Di TKP tersebut kapasitas untuk menampung kendaraan bermotor baik

mobil maupun sepeda motor cukup memadai. Jaraknya pun tidak terlalu jauh yakni sekitar satu kilometer dan pengunjung bisa berjalan kaki menyusuri jalur pedestrian Jalan Margo Utomo.

Hanya, masyarakat memiliki kebiasaan untuk parkir di lokasi terdekat. Sehingga hal itu juga harus diperhatikan. "Makanya kami berkoordinasi dengan camat untuk mengidentifikasi lokasi yang masih memungkinkan," tandasnya. Aspek ekonomi warga setempat juga menjadi pertimbangan. Apalagi sejumlah warga di sana selama ini bergantung pada pencaharian dari jasa parkir.

Sebelumnya, Camat Jetis Sumargandi mengatakan, terdapat beberapa lokasi alternatif yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi parkir untuk pengunjung di kawasan Tugu seperti di depan Pasar Kranggan. "Di belakang Pasar Kranggan juga masih memungkinkan serta di Balai Kampung Kebon Dalem. Nanti bisa dikerjasamakan dengan kampung," katanya. **(Dhi)-f**

Diserahkan, Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD 2020

YOGYA (KR) - Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam X menerima berkas 'Exit Meeting' Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) DIY di Gedhong Pare Anom, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (16/12). Exit meeting ini menandakan bahwa pemeriksaan LKPD Tahun 2020 yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada BPK telah selesai.

Kepala Sub Auditorat BPK DIY Agustin Sugihartatik mengatakan, secara garis besar pemeriksaan interim atas LKPD Tahun 2020 di DIY berjalan lancar. Pemeriksaan interim sebagai bentuk pembinaan dan evaluasi atas pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Pemeriksaan tersebut sangat mendukung tugas pemerintah untuk memenuhi amanat masyarakat. Seperti melakukan

tata kelola keuangan, karena akuntabilitas dan transparansi terhadap tata kelola keuangan Pemda DIY merupakan suatu keharusan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Wagub DIY Paku Alam X mengapresiasi dan bangga atas kerja keras yang telah dilakukan oleh semua pihak. Karena mereka telah aktif membantu dan terlibat dalam proses pemeriksaan interim atas LKPD yang dirasa sudah lengkap dan sudah lebih baik dari tahun sebelumnya.

"Saya mengapresiasi berbagai usaha dan kerja keras yang telah dilakukan oleh tim pemeriksa. Sehingga selama proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. Semoga hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan DIY menjadi lebih baik lagi," ungkapnya. **(Ria)-f**

DUKUNG PELAYANAN KESEHATAN RS JOGJA Bank BPD DIY Sumbang Ambulans ke Pemkot

YOGYA (KR) - Tepat sehari setelah ulang tahunnya ke-59 tahun, Bank BPD DIY menyumbangkan satu unit mobil ambulans ke Pemkot Yogyakarta. Armada itu pun akan dipergunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan di RS Jogja.

Direktur Utama BPD DIY Santoso Rohmad, mengatakan pihaknya memiliki komitmen untuk selalu berpartisipasi dalam meningkatkan kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat. "Bentuk tanggung jawab tersebut ditunjukkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan menyerahkan satu unit mobil ambulans," katanya di halaman air mancur Balaikota, Rabu (16/12). Ia berharap dengan diserahkannya mobil ambulans tersebut dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan pada saat emergency untuk masyarakat yang membutuhkan.

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, pada kesempatan itu pun mengapresiasi sinergitas dengan Bank BPD DIY yang terbangun selama ini. Bantuan mobil ambulans tersebut akan difungsikan untuk RS Jogja agar bisa lebih mempercepat pelayanan kepada masyarakat Kota Yogyakarta. "Dengan adanya tambahan untuk mobilisasi diharapkan RS Jogja semakin cepat dan baik lagi dalam melayani masyarakat untuk ke de-



KR-Istimewa

Penyerahan bantuan CSR Bank BPD DIY berupa 1 unit armada ambulans.

pannya," terangnya.

Menurutnya fungsi ambulans sangat penting, pihaknya pun menegaskan jika Pemkot Yogyakarta akan terus menambah unit ambulans di Kota Yogyakarta. "Kami akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk memperbanyak unit ambulans, untuk apa. Untuk menjemput ketika ada emergency baik itu di rumah, di jalan atau di mana pun," jelasnya. **(Dhi)-f**

Open House dan Trial Class Virtual HSPG



KR-Devid Permana

Anggo Marantika menyampaikan paparan secara virtual.

YOGYA (KR) - HSPG (Home Schooling Prima-gama) mengadakan open house webinar dan trial class, Senin (14/12) diikuti tak kurang 45 peserta (orang tua siswa) dari seluruh Indonesia. Tema yang diangkat Memahami Kebutuhan Anak dan Mengelola Emosi Orang Tua saat Masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

General Manager HSPG Anggo Marantika MSc mengatakan, selama pandemi, anak terpaksa belajar secara daring dari rumah masing-masing didampingi orang tuanya. Tak jarang orang tua mengalami kesulitan dalam memberikan pendampingan

Selain open house untuk jenjang SD-SMA tersebut, HSPG juga mengadakan open house serupa namun untuk jenjang PAUD pada Selasa (15/12) menghadirkan pembicara Dr Indria Laksmi Gamayanti MPsi Psikolog, Ketua Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia sekaligus pemilik Biro Konsultasi Psikologi Kemuning Kembar.

Lebih lanjut dijelaskan Anggo, dalam open house juga dipaparkan soal arah perkembangan pendidikan di masa mendatang, pascapandemi Covid-19. Menurut Anggo, ke depan sekolah rumah akan berkembang pesat. Pendidikan home schooling yang memiliki fleksibilitas dalam proses pembelajarannya, bisa menjadi alternatif pilihan para orang tua.

"HSPG tidak hanya fokus meningkatkan kemampuan akademik siswa, tapi juga membekali siswa keterampilan melalui pendidikan vokasi, termasuk keterampilan Abad 21, seperti berpikir kritis, kreativitas, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama," pungkasnya. **(Dev)-f**

MCCC Menginisiasi 'Getapak'

YOGYA (KR) - Dampak dari angka kasus Covid-19 Indonesia yang masih terus mengalami kenaikan dalam jangka panjang, dapat menimbulkan kelesuan ekonomi hingga berimbas pada ketahanan pangan warga.

Karena itulah Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) didukung Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) menginisiasi Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga (Getapak). Hal tersebut guna mendukung ketahanan pangan warga terdampak Covid-19 melalui kantor pos yang diluncurkan di Kantor Pos Besar Yogyakarta, Senin (15/12).

"Secara teknis kegiatan itu berbasis masyarakat. Sasaran utamanya rumah tangga di perkotaan 80 persen dan pedesaan 20 persen," kata Manager Program Getapak, Bachtiar Dwi Kurniawan. Sasarannya meliputi kelompok rentan secara ekonomi karena terdampak pandemi Covid-19.

Terdiri dari korban PHK, tidak bekerja, tidak mendapat bantuan sosial dan tidak menerima bantuan pemerintah maupun swasta.

Koordinator fasilitator program Nur Sigit Nugroho mengatakan, syarat mendapatkan program yakni keluarga terdampak Covid-19 yang di dalamnya terdapat lansia, korban PHK, tidak bekerja dan diutamakan belum pernah dapat bantuan apapun dari pemerintah. Bantuan senilai Rp 1,5 juta tersebut pencairannya selama dua tahap hingga Maret 2020. "Yang menerima program, kelompok rentan secara ekonomi karena terdampak pandemi Covid-19," terang Sigit.

Untuk penerima program Getapak di Kelurahan Notoprajan, Ngampilan dan Wirobrajan Yogyakarta sebanyak 288 kepala keluarga yang telah menerima dana stimulus tahap I saat penyaluran melalui Kantor Pos Besar Yogyakarta. **(Feb)-f**

BANGUN PERTUMBUHAN EKONOMI DESA

Kalurahan di DIY Kelola Danais Dengan Skema BKK

PEMDA DIY melalui Dana Keistimewaan (Danis) Tahun Anggaran (TA) 2021 menetapkan kebijakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Kalurahan/Desa dalam rangka untuk mendukung, mendorong dan memandirikan masyarakat di desa/kalurahan. Dengan adanya BKK ini diharapkan Keistimewaan DIY tidak hanya berada di level provinsi/kabupaten tapi bisa diturunkan ke tingkat desa/kalurahan sebagai bagian yang harus bisa mendukung Keistimewaan DIY.

Hal ini seiring dengan Pidato Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X dalam "Sapa Aruh Peringatan Sewindu UJUK DIY yang digelar di Bangsal Pagelaran Kraton Yogyakarta pada 31 Agustus 2020 lalu. Penyelenggaraan Keistimewaan DIY di Kalurahan dimaksudkan untuk membangun pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di desa/kalurahan. BKK Danais adalah bantuan Pemda DIY kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan, dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja transfer, bersumber dari Danais.

"Dengan demikian akan mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan," kata Kepala Bidang (Kabid) Urusan Kebudayaan Paniradya Kaistimewaan Cahyaningsih dikantornya Gedhong Pracimosono Kepatihan, Rabu (16/12).

Cahyaningsih mengatakan pelaksanaan BKK berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 100/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan BKK Danais kepada Pemerintah Kalurahan, pada Pasal 6 disebutkan BKK ke Kalurahan dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis Gubernur dalam Urusan Keistimewaan. Hal tersebut diwujudkan dalam Desa Mandiri Budaya, Rintisan Desa Mandiri Budaya, Balai Budaya, Arsitektur Yogyakarta, Cagar Budaya, Warisan Budaya Tak Benda, Karangkoepok, pemanfaatan ruang pada satuan ruang



KR-Istimewa

Gubernur DIY Sultan HB X didampingi Paniradya Pati Kaistimewaan Aris Eko Nugroho berfoto dengan perwakilan Kalurahan/Desa penerima SK Desa Mandiri Budaya dan BKK Danais 2021

strategis (SRS), penerapan administrasi tanah desa, penerapan tata nilai semangat keyogoyakartaan dan Budaya Maritim.

"Danais 2021 disalurkan kepada 33 Kalurahan/Desa dengan program dan kegiatan yang difasilitasi melalui BKK Danais untuk mendukung kebijakan strategis Gubernur dalam urusan keistimewaan. Ujicoba pelaksanaan dilakukan pada 2021 yang membutuhkan komitmen, perhatian dan kerjasama dari semua pihak guna mendukung baik yang sudah mendapatkan alokasi BKK Danais maupun yang masih dalam proses pengusulan tahun-tahun kedepan," ungkapnya.

Keberhasilan pelaksanaan 2021, ditekankan Cahyaningsih menjadi acuan pelaksanaan 2022 dan seterusnya. Pengelolaan Danais dipertanggungjawabkan baik secara kinerja program dan kinerja keuangan dengan tahapan transfer yang diatur dengan Nomor PMK 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Danais DIY. BKK Danais 2021 dengan total Rp 18,78 miliar tersebut dimanfaatkan bagi 10 Desa Mandiri Budaya Rp 10 miliar, 7 Desa Karangkoepok Rp 350 juta, pembangunan 3 Balai Budaya Desa Rp 4,6 miliar, 3 Desa Budaya Maritim Rp 2 miliar dan 10 Desa Padat Karya Istimewa Rp 1,8 miliar.

"10 Desa Mandiri Budaya tersebut yaitu Bejiharjo Gunungkidul, Pagerharjo Kulonprogo dan Jatimulyo Kulonprogo yang dikoordinatirinya Dinas Pariwisata (Dispar) DIY. Selanjutnya Desa Putat Gunungkidul, Girikerto dan Bangunkerto Sleman dikoor-

dimatirinya Dinas Koperasi dan UKM DIY. Desa Pandowharjo dan Wedomartani Sleman serta Sabdadadi Bantul dikoordinatirinya Dinas Kebudayaan lalu Desa Margodadi Sleman dikoordinatirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY," terangnya.

Desa/Kalurahan Mandiri Budaya adalah desa/kalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam kehidupan dan mengaktualisasikan nilai-nilai keistimewaan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya. Dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketentraman warga dalam ke-bhinnekatunggal-ikaan.

"Yang dimaksud karangkoepok adalah kalurahan yang tidak mempunyai tanah Kalurahan yang digunakan untuk pelunggun dan/atau pengare-areng yang dikoordinatirinya Biro Tata Pemerintahan (Tampem) Setda DIY. 7 Desa Karangkoepok ini yaitu Kalitukuk dan Kemejing Gunungkidul, Trimurti dan Jagalan Bantul, Hargowilis, Hargotirto dan Kalirejo Kulonprogo," jelas Cahyaningsih.

Pembangunan Balai Budaya merupakan kegiatan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana kebudayaan dalam bentuk bangunan yang dapat dipergunakan untuk mendukung 7 obyek Kebudayaan dan silang OPD di desa/Kalurahan yang dikoordinatirinya Disbud DIY. 3 desa tersebut yakni Panggunharjo Bantul, Girikerto dan Sendangagung Sleman. 4. Desa Budaya Maritim sendiri merupakan kalurahan yang berada di pinggir pantai selatan dengan keseluruhan gagasan yang mampu menghasilkan tindakan dan perilaku yang menjadi milik suatu kolektif yang tinggal dan hidup di pesisir pantai dan laut yang dikoordinatirinya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY. Tiga Desa Budaya Maritim ini adalah Gadingsari Bantul, Bugel Kulonprogo dan Tileng Gunungkidul.

"Desa padat karya istimewa ini ada di Kulonprogo meliputi Ngarosari, Gerbosari, Kebonharjo, Banjarsari dan Plered, serta di Gunungkidul meliputi Jeruk Wudel, Jepitu, Natah, Girisuko dan Banyusoco. 10 Desa padat karya istimewa ini dikoordinatirinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY," imbuhnya.

Penerapan tata nilai semangat keyogoyakartaan merupakan penerapan tata nilai budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat pengaktualisasiannya berupa penerapan segenap sumber daya (golong gilig) secara terpadu (sawiji) dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis (greet), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak (sengguh), dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun (ora mingkuh). Kegiatan yang mendukung penerapan tata nilai semangat keyogoyakartaan antara lain padat karya istimewa, penerapan Budaya Satriya, menumbuhkembangkan semangat kegotongroyongan sebagai upaya pengentasan kemiskinan. **(Ira)**